

Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Meredam Ketimpangan Pendapatan

West Java Provincial Government Policy Analysis in Reducing Income Inequality

¹Vera Marantika HN, ² Yuhka Sundaya, ³Meidy Haviz

1Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: 1veramaraan@gmail.com, 2 yuhkasun@gmail.com, 3meidyhaviz@gmail.com

Abstract. Based on data from the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of West Java Province, it shows that the rate of economic growth from year to year fluctuates, but the rate of economic growth each year seems to slow down. Income inequality is one of the problems in economic development because of the inequality of income distribution from total national income among various households in the country. The income inequality that occurs in West Java is at a moderate relative high each year. This study aims to determine how the influence of economic policies on income distribution and economic growth of West Java Province and identify how the impact of economic policies on equitable income and economic growth. The data used in this research is the time series data from 2000 to 2017 and model estimation using the two stage least square method. The results showed that economic growth, the provincial minimum wage in the previous year and the Human Development Index (HDI) had an effect on the gini ratio, as well as the ratio of negative effects on economic growth, government expenditure and Labor Force Participation Rate (TPAK) had a positive effect on growth economy. Based on the simulation results, the determination of the Human Development Index (HDI) of 2 percent can reduce income inequality as measured by the gini ratio of 5.87 percent and increase economic growth by 0.21 percent. While the determination of government spending of 2 percent can reduce income inequality by 2.18 percent and increase economic growth by 0.57 percent.

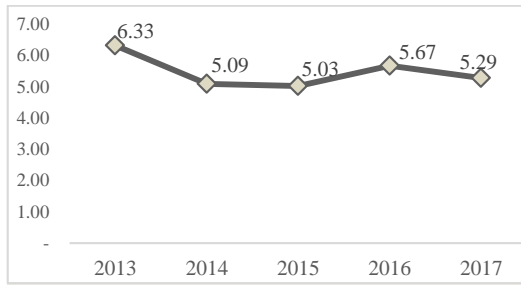
Keywords: Economic Growth, Income Inequality, Policy, Two Stage Least Square

Abstrak. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun berfluktuatif, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya seolah melambat. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi karena adanya ketidakmerataan pembagian pendapatan dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Barat berada pada angka sedang relatif tinggi pada setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi terhadap pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan mengidentifikasi bagaimana dampak kebijakan ekonomi terhadap pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dari tahun 2000 sampai dengan 2017 dan estimasi model menggunakan metode *two stage least square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi tahun sebelumnya dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap gini rasio, begitu juga gini rasio berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil simulasi, penetapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 2 persen mampu menurunkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio sebesar 5,87 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21 persen. Sedangkan penetapan pengeluaran pemerintah sebesar 2 persen dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 2,18 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,57 persen.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Kebijakan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Menurut (Badan Pusat Statistika, 2018) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

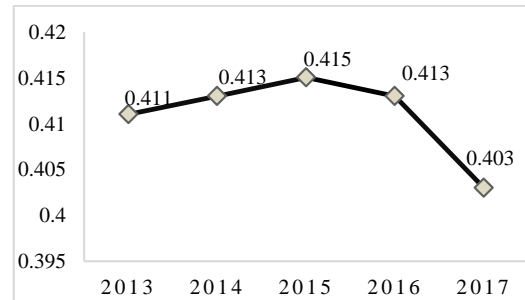


Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah 2018

Gambar. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Pada Gambar.1 selama kurun waktu lima tahun periode 2013-2017 berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun berfluktuatif, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya seolah melambat. Pada tahun 2014 Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat turun menjadi 5,09 persen dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2013 yang mencapai angka sebesar 6,33 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,03 persen. Terjadi kenaikan pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat menjadi sebesar 5,67 persen dan terjadi kembali penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada taun 2017 yaitu menjadi 5,29 persen.

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi karena adanya ketidakmerataan pembagian pendapatan dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan dapat menggunakan indeks gini. Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna).



Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah 2018

Gambar. 2 Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Gambar.2 selama kurun waktu lima tahun periode 2013-2017 dari data gini rasio Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan Provinsi Jawa Barat berada pada angka relatif tinggi. Tahun 2013 gini rasio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,411 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,413. Gini rasio Provinsi Jawa Barat kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,415. Pada tahun 2016 gini rasio Provinsi Jawa Barat menurun kembali pada angka 0,413, dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,403 pada tahun 2017.

Sebagai komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meredam ketimpangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pemerintah membuat visi yang terangkum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu; “Visi: “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua” pencapaiannya dijabarkan dalam beberapa misi, terutama pencapaian misi 2 yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian misi 2 yaitu “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian

yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Penelitian ini akan mencoba menelaah kebijakan pemerintah dalam meredam ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sedemikian hingga penelitian ini akan menjadi lebih menarik. Sebab, Secara eksplisit dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat tidak ditemukan komitmen kuat pemerintah Jawa Barat berupa kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah untuk meredam ketimpangan pendapatan.

Kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu memiliki pengaruh terhadap kondisi ketimpangan pendapatan. Namun, bentuk kebijakan yang bagaimana dan kebijakan secara spesifik yang diarahkan pada ketimpangan pendapatan, belum terinformasikan secara jelas. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti "Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Meredam Ketimpangan Pendapatan".

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh kebijakan ekonomi tersebut terhadap distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat ?

Bagaimana besaran dampak kebijakan ekonomi terhadap pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi?

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi kebijakan ekonomi yang terkait dengan masalah ketimpangan

pendapatan.

2. Menggunakan metode ekonometrika yang dapat menjelaskan perubahan gini rasio dari variabel kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Barat

B. Landasan Teori

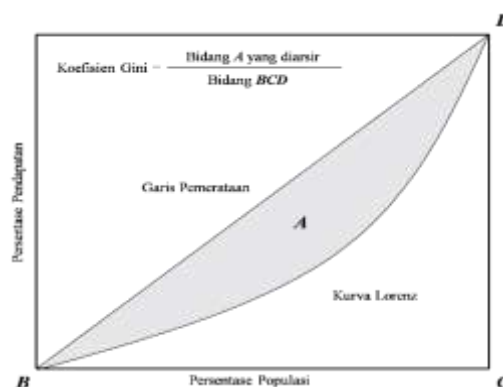
Ketimpangan Pendapatan

Wilkinson dan Pickett (Febriani, 2016) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan indikator bagaimana sumber daya material dapat didistribusikan untuk seluruh masyarakat. Ketimpangan pendapatan dilihat sebagai faktor yang dapat menyebabkan konflik, membatasi kerja sama ataupun menciptakan stres pada kondisi psikologis dan kesehatan fisik.

Indikator Ketimpangan Pendapatan Kurva Lorenz

Cara lain untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah membuat kurva.

Kurva Lorenz ditunjukkan pada Gambar.3



Gambar. 3 Kurva Lorenz

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka tinggi pula derajat pemerataan yang ditunjukkan (Todaro, 2011).

Koefisien Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini diformulasikan dalam rumus dibawah

ini:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan:

GR : Koefisien Gini

F_{pi} : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{Ci} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{Ci-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-

Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (Kemerataan sempurna) sampai 1 (tidak merata sempurna). Koefisien Gini diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

3. Ketidakmerataan tinggi jika nilai koefisien Gini sebesar 0,50 - 0,70
4. Ketidakmerataan sedang jika nilai koefisien Gini sebesar 0,36 - 0,49
5. Ketidakmerataan rendah jika nilai koefisien Gini sebesar 0,20 - 0,35

Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Bank Dunia menentukan kriteria tentang penggolongan pembagian pendapatan, apakah dalam keadaan kepincangan yang parah, sedang atau ringan. Bank Dunia menetapkan kriteria tersebut untuk membantu pemerintah lebih cepat dalam mengamati penduduk paling miskin yang perlu mendapat prioritas dalam pembangunan (Bank Dunia, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di setiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2011).

Faktor-faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2011) bahwasanya ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, ketiganya adalah:

- a. Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang didalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Sukirno, 2001) beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.
2. Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil estimasi atas model ekonometrika yang diperoleh dari langkah respesifikasi yang dilakukan berulang kali dan dengan mempertimbangkan kriteria ekonomi, selengkapnya diringkas dalam tabel. 1.

Tabel.1 Hasil Estimasi Model Ekonometrika dengan Metode Estimasi 2SLS

Jenis Persamaan	R ²	Prob F
Persamaan Gini Rasio GR GR _t =3,97+0,27ln_pe _t - 0,46ln_ump _{t-1} -0,39ipm _t Prob t 0,0176 <.0001 0,0005 0,0466	0.9193	<.0001
Persamaan Pertumbuhan Ekonomi PE ln_PE _t = 10,65 - 2,07gr _t + 0,24 ipaklag _t + 0,39ln_ge _t Prob t <.0001 0,0463 0,0225 0,0001	0.9700	<.0001

Keterangan :

Prob F = Probability of F statistic

Prob t = Probability of t statistic

R² = Koefisien determinasi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh persamaan dapat memenuhi kriteria ekonomi. Hal ini terlihat dari tanda masing-masing variabel penjelas terhadap masing-masing variabel endogen dalam setiap persamaan. Secara umum, nilai uji tiap peubah endogen memiliki nilai yang berada dalam interval 91,93 persen sampai 97,00 persen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R² dalam setiap persamaan. Hasil analisis statistik dengan uji F menunjukkan seluruh persamaan struktural nyata pada taraf $\alpha = 0,05\%$. Hal ini berarti secara bersama-sama setiap peubah eksogen dalam persamaan berpengaruh nyata terhadap peubah endogennya. Dengan ditemukannya terdapat R² yang cukup tinggi dalam persamaan struktural, misalnya dalam persamaan pertumbuhan ekonomi, maka indikator statistik ini menunjukkan adanya gejala multikolinear. Namun setelah

diestimasi interkorelasi dalam variabel penjelas pada masing-masing persamaan, tercermin dalam R² setiap persamaan tersebut tidak ditemukan satupun hasil estimasi tersebut yang menunjukkan adanya interkorelasi dalam variabel penjelas masing-masing persamaan yang sempurna. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Untuk mendeteksi apakah dalam model yang digunakan dalam penelitian ini terdapat autokorelasi terhadap variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya dapat dilihat jika nilai signifikansi dari prob*R < 0,05 maka model tersebut mengandung autokorelasi, tetapi apabila nilai signifikansi dari prob*R > 0,05 maka model tersebut tidak mengandung autokorelasi.

Interpretasi Hasil Persamaan Gini Rasio

Berdasarkan analisis yang digunakan dalam penelitian, gini rasio dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (LN_PE_t), upah minimum provinsi tahun sebelumnya (LN_UMP_{t-1}) dan indeks pembangunan manusia (IPM_t) signifikan pada taraf 5 persen. hasil estimasi gini rasio diringkas dalam Tabel. 2.

Tabel.2 Hasil Estimasi Gini Rasio

Variabel	Koefisien Dugaan	Prob>t	Nama Variabel
Int	3,97	0,0176	Intersep
Ln_Pe _t	0,27	<.0001	Pertumbuhan Ekonomi
Ln_UMP _t	-0,46	0,0005	Lag Upah Minimum Provinsi
IPM _t	-0,39	0,0466	Indeks Pembangunan Manusia
R-sq: 0,9193 Prob F <.0001 Prob Chi-square: 0,6285			

Ket: Signifikan pada taraf $\alpha = 0,05$

Persamaan gini rasio memiliki R² sebesar 91,93 persen. Hal ini berarti

variabel-variabel predetermind dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap gini rasio sebesar 91,93 persen, 8,07 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan. Nilai probabilitas chi-square menunjukkan sebesar 0,6285, hasil tersebut lebih besar dari tingkat alpha (α) 0,05 sehingga berdasarkan uji hipotesis H_0 diterima atau dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi.

Hasil estimasi menginterpretasikan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen dapat meningkatkan gini rasio sebesar 0,27 poin. Kenaikan lag upah minimum provinsi 1 persen dapat menurunkan gini rasio sebesar 0,46 poin. Selanjutnya hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan indeks pembangunan manusia nampaknya memberikan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana setiap kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1 poin diidentifikasi akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,39 poin. Hasil estimasi dari persamaan gini rasio menunjukkan adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi tetapi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga meningkat. Namun peningkatan tersebut dapat dikompensasi atau di *offset* oleh upah minimum provinsi tahun sebelumnya dan indeks pembangunan manusia (IPM), mengingat penurunan upah minimum tahun sebelumnya dengan indeks pembangunan manusia terhadap gini rasio lebih besar daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio.

Interpretasi Hasil Persamaan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan Tabel. 3 menunjukkan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,9700 yang berarti 97 persen keragaman pertumbuhan ekonomi dapat

diterangkan oleh gini rasio, lag tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah, 3 persen diterangkan oleh variabel lain diluar persamaan. Hasil uji t statistik menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas chi-square menunjukkan sebesar 0,5493, hasil tersebut lebih besar dari tingkat alpha (α) 0,05 sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Hasil estimasi pada Tabel. 3 menunjukkan kenaikan gini rasio 1 poin menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen. Kenaikan lag tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1 persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen. Pengeluaran pemerintah berhubungan berpengaruh positif, dimana setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,34 persen.

Tabel.3 Hasil Estimasi Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien Dugaan	Prob>t	Nama Variabel
Int	3,97	0,0176	Intersep
Ln_Pe _t	0,27	<.0001	Pertumbuhan Ekonomi
Ln_UMP _t	-0,46	0,0005	Lag Upah Minimum Provinsi
IPM _t	-0,39	0,0466	Indeks Pembangunan Manusia
R-sq: 0,9193 Prob F <.0001 Prob Chi-square: 0,6285			

Validasi Model

Validasi model dalam penelitian ini mengacu pada indikator *root means square percent error* (RMSPE), sedangkan untuk mengevaluasi kemampuan model untuk simulasi historis dan peramalan digunakan statistik U atau *Theil's inequality coefficient*. Hasil validasi model diringkas dalam Tabel. 4.

Tabel. 4 Hasil Validasi Model Nilai RMSPE dan *Theil's Inequality Coefficient*

No	Variabel Endogen	RMSPE	U Theil
1	Gini Rasio	3,322	0,0162
2	Pertumbuhan Ekonomi	0,1706	0,0009

Hasil uji validasi menunjukkan nilai RMSPE sebesar 3 persen atau lebih kecil dari kriteria 20 persen yang menunjukkan bahwa persamaan gini rasio baik untuk disimulasikan. Nilai RSMPE persamaan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang baik pula karena lebih kecil dari kriteria 20 persen yaitu sebesar 0,1706 persen. Seluruh persamaan memiliki nilai *Theil's inequality coefficient* dibawah 0,2, sehingga model ekonometrika tersebut disimpulkan cukup valid untuk digunakan sebagai dasar 'simulasi dan peramalan.

Dampak Penetapan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Skenario simulasi kebijakan dalam penelitian ini adalah penetapan angka indeks pembangunan manusia sebesar 2 persen dan 4 persen. Hasil simulasi kebijakan penetapan IPM sebesar 2 persen dan 4 persen disajikan pada Tabel. 5.

Berdasarkan Tabel. 5 hasil simulasi penetapan IPM sebesar 2 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 5,87 poin. Penetapan indeks pembangunan sebesar

2 persen juga berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 0,21 persen. Penetapan IPM sebesar 4 persen dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 11,73 poin. Penurunan gini rasio mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,42 persen.

Tabel. 5 Hasil Simulasi Penetapan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Variabel Endogen	Nilai Dasar	Perubahan %	
		2%	4%
Gini Rasio	0.3613	-5,87	11,73
Pertumbuhan Ekonomi	20.5540	0,213	0,426

Dampak Penetapan Pengeluaran Pemerintah

Hasil simulasi kebijakan penetapan pengeluaran pemerintah sebesar 2 persen dan 4 persen diringkas dalam Tabel. 6.

Tabel 6. Hasil Simulasi Penetapan Pengeluaran Pemerintah

Variabel Endogen	Nilai Dasar	Perubahan	
		2%	4%
Gini Rasio	0.3613	2,18	17,79
Pertumbuhan Ekonomi	20.5540	0,57	1,13

Berdasarkan Tabel 6. hasil simulasi kebijakan penetapan pengeluaran pemerintah sebesar 2 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 2,18 poin. Penurunan ketimpangan pendapatan oleh kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 2 persen menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,57 persen.

Penetapan pengeluaran

pemerintah sebesar 4 persen dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 17,70 poin. Penetapan 4 persen pengeluaran pemerintah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 1,13 persen.

Dampak Penetapan Upah Minimum Provinsi

Hasil simulasi kebijakan penetapan upah minimum provinsi sebesar 2 persen dan 4 persen disajikan pada Tabel. 7.

Tabel 7. Hasil Simulasi Penetapan Upah Minimum Provinsi

Variabel Endogen	Nilai Dasar	Perubahan	
		2%	4%
Gini Rasio	0.3613	0	0
Pertumbuhan Ekonomi	20.5540	0	0

Berdasarkan Tabel 7. kebijakan untuk meningkatkan upah minimum provinsi sebesar 2 persen nampaknya tidak membawa perubahan untuk gini rasio pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum provinsi sebesar 4 persen juga belum berdampak pada ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio dan juga belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

D. Kesimpulan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dikaji memiliki pengaruh secara signifikan terhadap gini rasio dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti gini rasio dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat memiliki hubungan simultan.

Berdasarkan hasil simulasi kebijakan yang efektif untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan penetapan kebijakan IPM dan pengeluaran

pemerintah sebesar 2 persen.

E. Saran

Kebijakan pemerintah untuk tidak memperlebar ketimpangan pendapatan seharusnya lebih diprioritaskan pada peningkatan IPM dan pengeluaran pemerintah, sesuai dengan hasil simulasi yang terbukti bahwa peningkatan IPM dan pengeluaran pemerintah dapat menurunkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus lebih menyikapi dan hati-hati dalam penetapan strategi pengalokasian dan pendistribusian pengeluaran pemerintah agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. Pemerintah mengalokasikan dana berdasarkan sektor atau lapangan usaha agar ketimpangan pendapatan di Jawa Barat berkurang melalui perluasan kesempatan kerja.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan daerah Jawa Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2013-2018
- Badan Pusat Statistika. (2018). Data dan Informasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018: www.badanpusatstatistika.com
- Bank Dunia. (2015). Ketimpangan yang Semakin Lebar. Jakarta: The World Bank
- Febriani. (2016). Analisis Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan dan Keterbukaan Pasca Krisis Ekonomi. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Todaro, M. P. (2011). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.